



Penyuluhan Konservasi Sumber Daya Hutan melalui Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) *Extension on Forest Resources Conservation through Community Forest Scheme (HKm)*

**Yudi Safril Ariza¹, Bainah Sari Dewi^{1*}, A. Nizam Syahiib¹, Wulan Ayu Lestari¹,
Cindy Yoeland Violita¹, Elza Wahyuni¹, Sugeng P. Harianto¹, dan Gunardi Djoko
Winarno¹**

¹Program Studi Magister Kehutanan, Jurusan Kehutanan, Pascasarjana Fakultas Pertanian,
Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

***Korespondensi:** bainahsariwicaksono12@gmail.com

Diterima (Received):
21-Desember-2022

Diterima (Accepted):
20-Juni-2023

Terbit (Published):
20-Juni-2023

ABSTRAK

Hutan kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu skema perhutanan sosial yang tujuan utamanya adalah melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat. Konsep ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan mempertahankan kelestarian SDA. Perlu adanya keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaannya. Salah satunya adanya kegiatan penyuluhan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya dalam aspek konservasi lingkungan. Pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan peningkatan masyarakat terhadap kegiatan penyuluhan konservasi sumber daya hutan. Metode yang digunakan yaitu metode ceramah dan menggunakan analisis pre test dan post test untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta penyuluhan. Berdasarkan hasil kegiatan, terdapat peningkatan pemahaman peserta sebesar 20.09%. Peningkatan ini didasarkan pada kemampuan masyarakat menangkap materi yang disampaikan. Variabel yang mempengaruhi terhadap peningkatan peserta yaitu pada aspek kelembagaan dan peran stakeholder. Namun, terdapat aspek yang mengalami peningkatan yang cukup rendah yaitu konservasi keanekaragaman hayati. Sehingga, perlu adanya upaya keberlanjutan terhadap kegiatan dalam aspek praktik.

ABSTRACT

Kata Kunci:
*Penyuluhan, gapoktan,
konservasi, HKm*

Keywords:
*Counseling, Gapoktan,
conservation, HKm*

Community forestry (HKm) is one of the social forestry schemes whose main objective is to manage and utilize forests based on community empowerment. This concept aims to strengthen institutions and maintain the sustainability of natural resources. There needs to be the involvement of various parties in its implementation. One of them is the existence of extension activities to provide understanding and knowledge to the public, especially in the aspect of environmental

conservation. This service aims to determine the community's understanding and improvement of forest resource conservation extension activities. The method used is the lecture method and uses pre-test and post-test analysis to determine the increase in understanding of the counseling participants. Based on the results of the activity, there was an increase in participants' understanding of 20.09%. This increase is based on the ability of the community to understand the material presented. Variables that influence the increase in participants are the institutional aspects and the role of stakeholders. However, there is an aspect that has experienced a relatively low increase, namely the conservation of biodiversity. Thus, there is a need for sustainability efforts towards activities in the practical aspect.

PENDAHULUAN

Hutan kemasyarakatan (HKm) merupakan hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat [1]. HKm merupakan salah satu program pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam melakukan pengelolaan kawasan secara bersama-sama [1].

Pengelolaan lahan HKm ada upaya pelibatan masyarakat dilakukan dengan memperkuat kelembagaan masyarakat. Dengan adanya kelembagaan pada kelompok tani HKm dapat menjadi dasar dalam melaksanakan setiap program yang ada di dalam kelompok tersebut. Partisipasi aktif masyarakat pengelola lahan HKm dalam kelembagaan dapat memberikan dampak baik positif maupun dampak negatif terhadap perilaku masyarakat dalam mengelola lahan HKm. Menurut [2], partisipasi aktif petani dalam kegiatan kelembagaan memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan dari usaha tani yang sangat signifikan. Keberadaan gapoktan seharusnya dapat memberikan dampak positif bagi anggota dan keberadaan hutan itu sendiri. Masyarakat tetap dapat memperoleh peningkatan pendapatan dari pemanfaatan keberadaan lahan HKm dengan tetap memperhatikan kelestarian lahan HKm itu sendiri. Bagi Provinsi Lampung, Hkm diharapkan dapat mencegah kerusakan hutan yang masih tersisa dan merehabilitasi hutan yang rusak dengan melibatkan sepenuhnya peran serta masyarakat di sekitar hutan. HKm diharapkan pula dapat mengakomodasi dua kepentingan yang selama ini menjadi sumber konflik yaitu kepentingan pelestarian fungsi hutan dan

kesejahteraan masyarakat setempat. Salah satu wilayah dengan sistem pengelolaan HKm adalah pada Kabupaten Tanggamus.

Margo Rukun adalah salah satu Gapoktan yang beralamatkan di Pekon Ngarip kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus. Gapoktan ini memiliki 7 Kelompok Tani Hutan dengan luasan pengelolaan 1.300 ha dengan 800 petani dan sudah mulai masuk ke skema HKm mulai dari 2009. Lahan kelola Gapoktan Margo Rukun secara topografis berada pada ketinggian 500-1000 mdpl dan menjadi daerah tangkapan air. Artinya pada daerah ini perlu diperhatikan pengelolaan sumber daya hutan yang baik dan berkelanjutan dari segi ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. Jika kita melihat kondisi sekarang, pada areal pengelolaan Gapoktan sudah mulai menerapkan sistem atau pola Agroforestry dimana tanaman utama mereka adalah kopi dan di intergrasikan dengan tanaman kehutanan baik itu kayu-kayuan ataupun MPTs.

Solusi dari hal tersebut, Tim pengabdian dari Magister Kehutanan Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung melakukan kegiatan penyuluhan konservasi sumber daya hutan melalui skema HKm sebagai kegiatan untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat mengenai sistem pengelolaan sumber daya hutan karena areal tersebut mejadi area tangkap air. Selain itu juga didasari atas pentingnya upaya konservasi sumberdaya hutan demi tercapainya hutan Lestari masyarakat sejahtera.

METODE

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan oleh Tim PKM Magister Kehutanan Universitas Lampung pada bulan November 2022 di Pekon Ngarip, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Kabupaten Tanggamus berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan Lindung. Alat yang digunakan pada kegiatan penyuluhan ini adalah: kuesioner, pulpen, laptop dan proyektor. Adapun objek penelitian ini adalah kelompok tani pekon ngarip berjumlah 22 koresponden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari data yang diperoleh secara langsung dari Gapoktan sebagai peserta, tidak melalui perantara. Data primer yang digunakan berupa data nama koresponden.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1) Observasi Lapangan

Teknik observasi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang aktual dan langsung dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.

Selain itu observasi lapangan dilakukan untuk mengobservasi lokasi, baik kondisi fisik maupun keadaan masyarakat daerah penelitian dengan terjun langsung ke lapangan. Teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung aktivitas masyarakat di lapangan.

2) Kuesioner

Kuesioner digunakan untuk mengukur persepsi dan sikap masyarakat. Dilakukan dengan mengajukan lembaran angket yang berisi daftar pertanyaan kepada responden. Daftar pertanyaan tersebut sifatnya tertutup, maksudnya jawaban alternatif telah disediakan kecuali daftar pertanyaan mengenai identitas responden bersifat terbuka. Kuesioner yang digunakan merupakan tes skala sikap yang mengacu kepada parameter skala *Likert*. Menurut [3] skala *Likert* merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Pilihan jawaban dikategorikan sebagai suatu pernyataan sikap dengan taraf SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju), dan STS (sangat tidak setuju). Kategori ragu-ragu (R) tidak diikutsertakan untuk menghindari sikap keragu-raguan pada masyarakat. Angket ini diberikan sebanyak dua kali sebelum dan setelah keseluruhan tahapan pelaksanaan selesai dilakukan.

3) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat berbagai dokumen yang ada pada saat dilapangan. Studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder.

4) Studi Literatur

Studi literatur adalah mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, baik pendapatnya sebagai dasar teori maupun sebagai pembanding dalam pemecahan masalah. Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian berupa peta, tabel, makalah, dokumen atau data-data dari instansi pemerintahan.

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi :

a) *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau data yang terkumpul tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau

kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang atau dengan interpolasi (penyisipan).

b) *Coding*

Coding adalah pemberian/ pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka/huruf-huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.

c) *Skoring*

Proses penentuan skor atas jawaban responden yang dilakukan dengan membuat klasifikasi dan kategori yang cocok tergantung pada anggapan atau opini responden. Penghitungan *scoring* dilakukan dengan menggunakan skala Likert yang pengukurannya sebagai berikut (Riduwan, 2009 : 87) : a. Skor 4 untuk jawaban sangat setuju b. Skor 3 untuk jawaban setuju c. Skor 2 untuk jawaban tidak setuju d. Skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju

d) *Tabulasi Data*

Tabulasi adalah membuat tabel-tabel yang berisikan data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan.

e) *Penyajian Data*

Hasil penyusunan dan pengelompokan data di atas, data dapat disajikan dalam bentuk tabel, gambar, bagan dan peta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TIM PKM Magister Kehutanan Universitas Lampung telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Pekon Ngarip, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus. Adapun target atau sasaran masyarakat pada kegiatan ini yaitu anggota Gapoktan Margo Rukun. Kegiatan pengabdian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan dan mentransfer ilmu kepada anggota masyarakat dengan memberikan penyuluhan tentang bagaimana upaya konservasi pada lahan perhutanan sosial. Pengukuran dan analisis data tingkat pemahaman masyarakat terhadap kegiatan penyuluhan yang diberikan yaitu menggunakan instrumen pre-test dan post-test serta dalam analisisnya menggunakan *skoring* dengan software Ms. Excel [4].

Kegiatan penyuluhan pada dasarnya adanya penyebarluasan informasi, sehingga pada hakekatnya perlu adanya etika komunikasi dan komunikasi yang efektif. Komunikasi dapat diartikan sebagai pemahaman dalam interaksi dan transaksi. Kegiatan dilaksanakan dengan komunikasi dua arah sehingga terdapat umpan balik (*feedback*) antara pemberi informasi dan penerima

informasi [5]. Penyuluhan merupakan salah satu bentuk praktik dan implementasi komunikasi.

Kegiatan penyuluhan ditujukan kepada Petani anggota Gapoktan Margo Makmur agar mereka mempunyai peningkatan terhadap pemahaman, motivasi dan yang kemudian dapat diimplementasikan dalam praktik konservasi pada lahan garapan petani [6]. Perhutanan sosial merupakan salah satu kebijakan yang selain mementingkan perekonomian masyarakat melainkan mementingkan atas kondisi sosial masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan dalam pengelolaan hutan merupakan regulasi dalam resolusi konflik. Tidak hanya semata-mata memberikan akses kepada masyarakat, melainkan dengan adanya konsep ini dapat memberikan hasil produksi yang maksimal, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan taraf kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, manfaat adanya konsep ini mampu berdampak langsung terhadap kondisi ekologi dan mampu mempertahankan serta meningkatkan biodiversitas di sekitar.

Kegiatan penyuluhan diawali dengan melakukan registrasi oleh peserta sejumlah 22 orang petani. Setelah itu dilanjutkan dengan pembukaan, serta sambutan-sambutan dari perwakilan TIM PKM, dari pihak gapoktan, dan dari pihak desa.

Kemudian, sebelum masuk pada sesi pemaparan materi, para peserta dibagikan borang *pre-test* yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman awal peserta terkait materi yang akan disampaikan. Menurut [6], pemahaman diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menangkap, mempertahankan, menduga, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menafsirkan, serta mengartikan sesuatu dengan caranya sendiri.

Setelah itu dilanjutkan tahap ketiga yang merupakan kegiatan inti berupa pemaparan materi yang disampaikan oleh 3 narasumber dosen (Prof. Dr. Ir. Sugeng Prayitno H, M.S., Dr. Ir. Gunardi Djoko Winarno, M.Si., dan Dr. Hj. Bainah Sari Dewi, S.Hut., M.P.) dan 5 narasumber mahasiswa (Yudi Safril Ariza, A. Nizam Syahiib, Wulan Ayu Lestari, Cindy Yoeland Violita, dan Elza Wahyuni). Metode yang digunakan yaitu metode ceramah untuk menyampaikan materi pokok yang bersifat teoritis, dengan yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi/tanya jawab [7]. Sub materi yang disampaikan adalah:

- 1) Hutan dan Manfaatnya
- 2) Upaya Koservasi
- 3) Perhutanan Sosial (Hutan Kemasyarakatan)
- 4) Kelembagaan Hutan
- 5) Keanekaragaman hayati

6) Pentingnya Upaya Konservasi (Penanaman)

Pemaparan materi disampaikan secara berurutan dan bergantian oleh para narasumber (Gambar 1 dan Gambar 2)-yang diselingi dengan kegiatan *ice breaking*. Setelah penyampaian materi usai, dilanjutkan dengan penutup dan pemberian borang *post-test* untuk mengetahui bagaimana pemahaman peserta setelah dilakukan penyampaian materi.

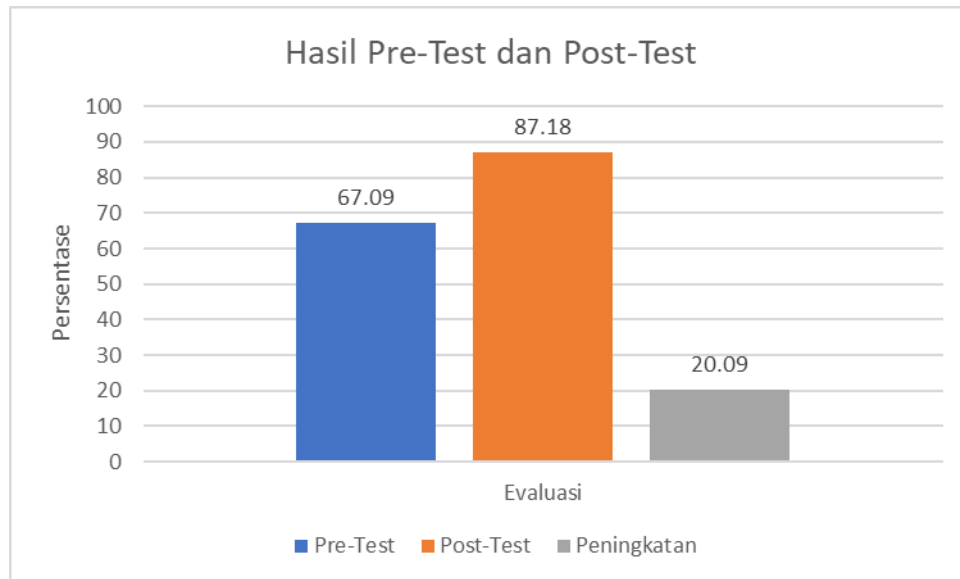


Gambar 1. Penyampaian materi oleh narasumber dosen



Gambar 2. Penyampaian materi oleh narasumber mahasiswa

Hasil *pre-test* dan *post-test* dirubah dalam bentuk skoring berdasarkan pada bobot jawaban. Kemudian dilakukan rata-rata pada hasil akhir pre dan post seluruh peserta. Sehingga didapatkan hasil perbandingan rata-rata nilai *pre-test* dan *post-test* peserta penyuluhan (Gambar 3).



Gambar 3. Perbandingan dan peningkatan hasil *pre-test* dan *post-test*

Peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan dapat dilihat dengan perbandingan persentase hasil *pre-test* dan *post-test* yang disajikan pada skala 0-100. Berdasarkan hasil diatas (Gambar 1), rata-rata hasil *pre-test* bernilai 67.09%, angka ini relatif cukup rendah untuk standar pengetahuan seseorang. Setelah dilakukan penyampaian materi, peserta diberikan borang untuk mengisi *post-test* dengan komposisi soal yang sama. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat penurunan atau peningkatan terhadap pemahaman peserta [8].

Hasil *post-test* menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil *pre-test*, yaitu sebesar 87.18%, sehingga mengalami kenaikan rata-rata sebesar 20.09%. Kenaikan ini cukup signifikan melihat dengan latar belakang pendidikan peserta yaitu mayoritas berpendidikan sekolah menengah. Dengan demikian pemberian atas materi dengan berbasis studi kasus dapat meningkatkan dan menguatkan kapasitas serta pengetahuan SDM secara spesifik [8].

Pengetahuan yang baik dapat menjadi bekal dalam melakukan sesuatu. Seperti dalam halnya melakukan pengelolaan kawasan hutan, maka diperlukan adanya ilmu tentang hutan itu sendiri dan komponen-komponen yang ada didalamnya. Didukung dengan kondisi kesadaran akan diri sendiri dan adanya

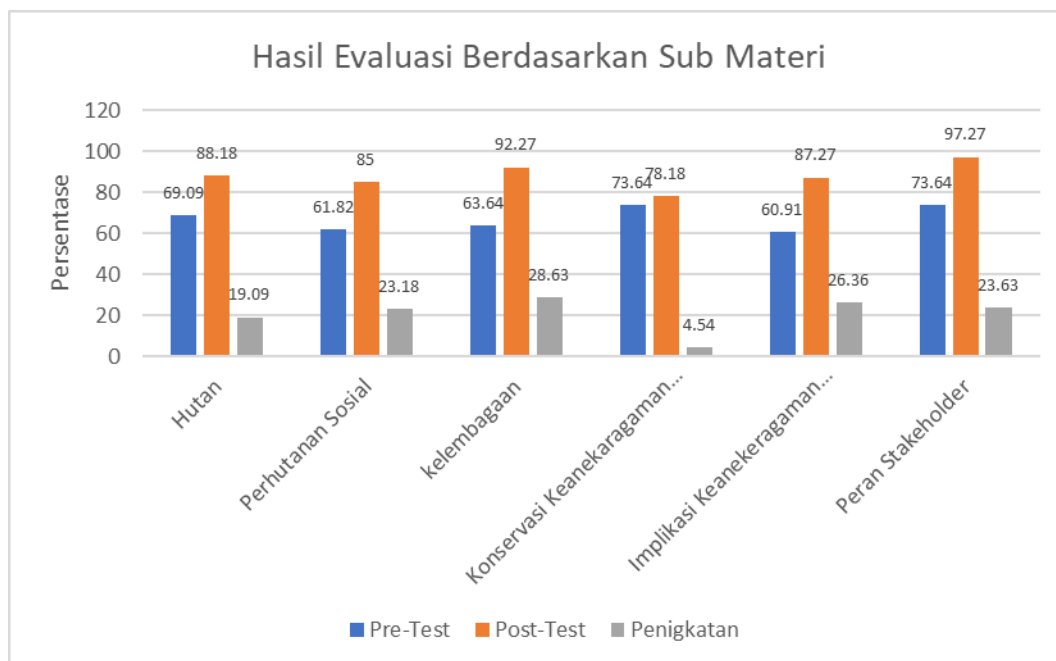
kelembagaan yang baik maka akan menghasilkan kinerja yang optimal [9]. Langkah kecil yang dapat dilakukan dalam menjaga ekosistem yaitu dengan mempertahankan fungsi ekologisnya, dan mempertahankan komponen yang ada didalamnya. Melakukan pemulihan dan rehabilitasi lahan merupakan kegiatan yang penting dilakukan dalam pelestarian lingkungan melalui kegiatan penanaman [10].

Kegiatan penanaman pohon diharapkan mampu memberikan multi fungsi, yaitu pembenahan lahan dan mampu mengembalikan keberagaman jenis di lingkungan [11]. Hal tersebut dapat berdampak positif bagi masyarakat. Masyarakat yang tinggal disekitar hutan akan dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan menjaga kelestarian hutan, sehingga hutan dapat lestari dengan dikelola baik oleh masyarakat lokal [12]. Berikut merupakan proses pengisian *pre-test* dan *post-test* oleh peserta (Gambar 4).



Gambar 4. Pengisian *pre-test* dan *post-test*

Hasil *pre-test* dan *post-test* dengan beberapa sub materi yang disampaikan menunjukkan bahwa pengetahuan responden bertambah untuk tiap-tiap submateri tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Peningkatan pemahaman responden pada tiap submateri

Submateri terkait hutan dan manfaatnya, pengetahuan responden meningkat sebesar 19,09% dari nilai *pre-test* sebesar 69,09% ke nilai *post-test* sebesar 88,18%. Pengetahuan atau wawasan ekologi masyarakat terhadap hutan merupakan faktor penting yang mempengaruhi pandangan dan kemampuan beradaptasi masyarakat [13]. Terkait perhutanan sosial, pengetahuan responden meningkat sebesar 23,18 dari nilai *pre-test* 61,82% ke nilai *post-test* sebesar 85%. Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan secara lestari dengan melibatkan masyarakat sekitar kawasan. Peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam pengembangan perhutanan sosial [14]. Pada sub materi kelembagaan, terdapat peningkatan pengetahuan sebesar 28,63% dari nilai *pre-test* sebesar 63,64% ke nilai *post-test* sebesar 92,27%. Masyarakat pada umumnya telah mengerti mengenai materi terkait kelembagaan yang disampaikan, terlebih lagi telah ada kelembagaan yang terbentuk dari masyarakat itu sendiri yaitu kelembagaan gabungan kelompok tani hutan (Gapoktanhut). Gapoktanhut memiliki mekanisme tata kelola lahan yang tertuang dalam bentuk kelembagaan dan kelembagaan gapoktanhut memiliki peran penting yang berfungsi mengatur aktivitas masyarakat secara individu ataupun kelompok dalam mengelola hutan [15].

Pada sub materi konservasi keanekaragaman hayati, terdapat peningkatan pengetahuan sebesar 4,54%, dari nilai *pre-test* sebesar 73,64% ke nilai *post-test* sebesar 78,18%. Hilangnya keanekaragaman hayati dapat mengancam kesejahteraan manusia dan merugikan operasi bisnis jangka

panjang seperti pekerja yang tidak sehat dan lainnya [16]. Pada sub materi implikasi keanekaragaman hayati, terdapat peningkatan pengetahuan sebesar 26,36% dari nilai *pre-test* sebesar 60,91% ke nilai *post-test* sebesar 87,27%. Keanekaragaman hayati yang tinggi dapat menyediakan banyak fungsi, baik ekologi, ekonomi, estetika maupun ameniti. Pengelolaan keanekaragaman hayati menjadi salah satu sorotan utama dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) [17]. Pada sub materi peran stakeholder, terdapat peningkatan pengetahuan sebesar 23,63%, dari nilai *pre-test* sebesar 73,64 ke nilai *post-test* sebesar 97,27%. Peran stakeholder sebagai pemegang posisi kunci di segala tingkatan sangat menentukan berhasil atau tidaknya proses perencanaan pembangunan kehutanan yang dilakukan [18].



Gambar 6. Foto bersama narasumber dan peserta

SIMPULAN

Kegiatan penyuluhan terbukti meningkatkan pemahaman peserta sebesar 20.09%. Kegiatan ini memberikan masukan, saran, dan evaluasi terhadap pemahaman masyarakat terkait implementasi konservasi sumber daya hutan di lapangan. Pada umumnya, masyarakat sudah mempunyai modal dan keterampilan dalam upaya konservasi, hal ini merupakan aspek penting harus mereka perhatikan dalam kegiatan pengelolaan kawasan hutan. Namun, untuk memberikan optimalisasi terhadap kegiatan masyarakat selanjutnya, diperlukannya pendampingan dan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan SDA.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Departemen Kehutanan. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2016. Peraturan Menteri Kehutanan nomor :P.37/Menhut-II/2007.[http: //www.dephut.go.id/files/P37_07.pdf](http://www.dephut.go.id/files/P37_07.pdf). 2007.
- [2] Hermanto. Rancangan Kelembagaan Tani. Bogor: Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2007.
- [3] Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Buku. Bandung: Alfabeta. 2018.
- [4] Saputri, D. N., Winarni, E. W., & Gunawan, A. Pengaruh Pemanfaatan Hutan Mangrove sebagai Sumber Belajar IPA terhadap Sikap Peduli Lingkungan Siswa Kelas IV SD Kota Bengkulu. *Jurnal PGSD: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, vol 12, no 2, p. 150-158. 2019.
- [5] Hasmawati, F. Manajemen Dalam Komunikasi. *Al-Idarah: Jurnal Pengkajian Dakwah dan Manajemen*, vol 5, no 6. 2018.
- [6] Nurdin, N., Badri, M., & Sukartik, D. Efektivitas sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada masyarakat di Desa Sungai Buluh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Riau. *Jurnal Riset Komunikasi*, vol 1, no 1, p. 70-87. 2018
- [7] Lanini, A., & Syafiuddin, I. Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Konservasi Lingkungan Bagi Masyarakat Watutela. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol 4, no 4, p. 701-707. 2020.
- [8] Wulandari, C., Bakri, S., Safe'i, R., Hilmanto, R., Pah, J. M., & Pangestu, P. Pelatihan Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Dalam Menanggulangi Dampak Sosial Ekonomi Petani Perhutanan Sosial Akibat Pandemi Covid-19 di KPH Pesawaran, Lampung. *Repong Damar: Jurnal Pengabdian Kehutanan dan Lingkungan*, vol 1, no 2, p. 136-143. 2022.
- [9] Benyamin, D. Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, vol 6, no 3, p. 131-140. 2019.
- [10] Dwi, A. A. N., Fithria, A., & Kissinger, K. Strategi Pengembangan Hutan Mangrove Di Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Kalimantan Selatan. *Jurnal Hutan Tropis*, vol 9, no 1, p. 88-93. 2021.
- [11] Ramadhani, M., Harahap, S. A., Lubis, R. H. H., Herdyana, T., Hariati, E., Malinda, L., & Ramadhan, N. Penanaman Pohon Pucuk Merah Sebagai Penghijauan di Desa Ajibaho. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol 1, no 1, p. 48-54. 2022.

-
- [12] Hariyanto, S. P., Rusita, R., Febryano, I. G., Dewi, B. S., Ayuningtyas, C. M., Handayani, T., Wahyuni, D.S., Lestari, M., & Gunawan, R. Penyuluhan Kepada Masyarakat Pekon Pahmungan Dalam Pelestarian Repong Damar di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. *Repong Damar: Jurnal Pengabdian Kehutanan dan Lingkungan*, vol 1, no 1, p. 43-53. 2022.
- [13] Permata, C.O., Iswandaru, D., & Febryano, I. G. Persepsi Masyarakat Pesisir Kota Bandar Lampung Terhadap Hutan Mangrove. *Journal of Tropical Marine Science*, vol. 4, no 1, p. 40-48. 2021.
- [14] Rahayu, E. M., & Triwanto, J. Penyuluhan perhutanan sosial di Kelompok Tani Hutan Kota Malang. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol 3, no 2. 2021.
- [15] Larasati, A. P., Febryano, I. G., Kaskoyo, H., & Wulandari, C. Peran Kelembagaan Gabungan Kelompok Tani dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. *belantara*, vol 4, no 1, p. 39-47. 2021.
- [16] Jannah, R. C. F., Yusmardono, Y., & Fathoni, F. S. Konservasi dan pengelolaan penyu: peran swasta dalam perlindungan satwa langka. *Learning Society: Jurnal CSR, Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, vol 3, no 1, p. 57-70. 2022.
- [17] Saroinsong, F. B., & Nurmawan, W. Pendidikan konservasi untuk generasi z kelurahan kleak kota manado tentang pentingnya keanekaragaman hayati. *Edupreneur: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat bidang Kewirausahaan*, vol 3, no 2. 2020
- [18] Sitorus, N. I. B. Peran dan kolaborasi stakeholder pariwisata dalam mendukung peningkatan kunjungan wisata di Kawasan Danau Toba. *Jurnal Hospitality dan Pariwisata*, vol 6, no 2, p. 56-105. 2020.